



MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCAERUPSI GUNUNG MERAPI DI JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA

Masrukin[✉], Toto Sugito, Bambang Suswanto, Ahmad Sabiq

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Article History

Received : June 2012
Accepted : August 2013
Published : Sept 2013

Keywords

empowerment;
extension;
training;
mentoring

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membuat model pemberdayaan masyarakat pascaerupsi Gunung Merapi di lokasi yang terkena dampak paling parah yaitu: di Desa Tlogolele Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, Desa Jumuyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dan Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah serta Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta. Menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk melakukan pengkajian keadaan desa secara partisipatif melalui wawancara mendalam, observasi dan *focus group discussion* (FGD). Hasil penelitian menunjukkan dari keempat lokasi, memiliki kesamaan dalam model pemberdayaan yaitu: (1) Masyarakat membutuhkan serangkaian kegiatan pemberdayaan secara menyeluruh, antara kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Karena selama ini, masyarakat telah mendapat penyuluhan, pelatihan dan bantuan, akan tetapi untuk program pendampingan yang dibutuhkan tidak diberikan. Akibatnya kurang mendukung pada keberlanjutan, peningkatan produktivitas dan pemasaran. (2) Masyarakat membutuhkan lembaga koperasi yang memiliki badan hukum sebagai pusat usaha perekonomian untuk memenuhi kebutuhan permodalan, bahan baku, dan akses jaringan pemasaran. (3) Masyarakat membutuhkan pelatihan secara periodik dan penguatan kembali kelompok siaga bencana di tingkat desa.

MODEL OF COMMUNITY DEVELOPMENT AFTER MOUNT MERAPI ERUPTION IN CENTRAL JAVA AND YOGYAKARTA

Abstract

This research aims to create empowerment model after the eruption of Mount Merapi in locations most severely affected: Tlogolele Village of Selo District in Boyolali Regency, Jumoyo Village of Salam District in Magelang Regency and Balerante Village in Kemalang District of Klaten Regency in Central Java Province and Kepuharjo Village of Cangkringan District in Sleman Regency in Yogyakarta Province. The research used Participatory Rural Appraisal (PRA) method for assessing participatory village situation through in-depth interviews, observation and focus group discussion (FGD). The results showed that the four villages, had similarities in the empowerment model: (1) Community requires a series and comprehensive of empowerment activities between extension, training and mentoring. (2) Community requires cooperative institution as a business center to obtain capital, raw materials and network marketing access. (3) Finally the community should receive periodic training and transformed to be a disaster task force at the village level.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

[✉] Corresponding author:
Address: FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Kampus Grendeng Purwokerto, 53122
E-mail address: riset.unseod@yahoo.co.id

ISSN 2086-5465

PENDAHULUAN

Pada peristiwa meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah sebagai bencana nasional yang terjadi rangkaian letusan pada bulan Oktober dan November 2010 dievaluasi sebagai yang terbesar sejak letusan 1872 dan memakan korban nyawa 273 orang (per 17 November 2010) juga sebagai penyimpangan dari letusan “tipe Merapi” karena bersifat eksplosif disertai suara ledakan dan gemuruh yang terdengar hingga jarak 20-30 km. Bahkan terjadi hujan kerikil dan pasir mencapai Kota Yogyakarta bagian utara, sedangkan hujan abu vulkanik pekat melanda hingga Purwokerto dan Cilacap. Pada siang harinya, debu vulkanik diketahui telah mencapai Tasikmalaya, Bandung, dan Bogor (sumber: <http://bpbj.jatengprov.go.id>).

Menurut data dari Bappenas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah 2011-2013 selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka bencana erupsi Gunung Merapi ini juga telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian besar di wilayah yang tersebar di empat kabupaten yakni Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Hasil riset Andayani (2011: 49) erupsi Gunung Merapi yang terjadi dari bulan Oktober sampai November 2010 telah banyak menelan korban dan kerusakan. Maka hal yang menjadi ancaman selanjutnya adalah bencana sekunder seperti banjir lahar dingin yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilakukan untuk mengembalikan semua aspek yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi, upaya ini mencakup sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, perekonomian dan lintas sektor.

Bencana sekunder tersebut, terjadi pada 25 Februari 2012 sebagai bencana susulan berupa banjir lahar dingin, yang mengakibatkan seluruh sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi mengalami banjir lahar dingin. Terdapat tujuh sungai yang terjadi banjir lahar dingin adalah Kali Pa-

belan, Blongkeng, Putih, Batang, Lamat, Krasak, dan Bebeng. Banjir lahar dingin tersebut mengakibatkan penahan material longsor di timur Dusun Nabin, Desa Gulon, Kecamatan Salam, dan di Dusun Surodadi, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang sepanjang 70 meter hanyut terbawa material banjir (sumber: <http://www.tempo.co/read/news>). Bahkan banjir lahar dingin Merapi menerjang 12 jalur sungai di lereng Merapi. Akibatnya, jalan raya Magelang-Yogyakarta, tepatnya Jembatan Pabelan, Desa Prumpung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jateng, sempat ditutup (sumber: <http://www.merdeka.com/>).

Menurut penelitian Maarif (2010: 2) secara sosiologis perhatian tentang bencana akan mengarah kepada bagaimana celah empirik menilai proses pembangunan yang dapat menimbulkan bencana, terjadinya disorganisasi sosial, interaksi yang mengarah kepada konflik, sistem kepercayaan, agama dan kearifan lokal (*local wisdom*) terhadap kehadiran bencana.

Maka permasalahannya bahwa ketanggungan sosial, ekonomi dan budaya di daerah rawan bencana masih harus mendapat perhatian serius, yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan atau penguatan kapasitas kelembagaan. Sebagaimana menurut Payne (1997: 226) bahwa pemberdayaan adalah “*to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients*”.

Maka penelitian tentang model pemberdayaan masyarakat sangat penting dan strategis yang menggunakan perspektif yang lebih partisipatif dan aplikatif dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) pada masyarakat pascaerupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Adapun maksud dari penelitian, yaitu untuk meningkatkan motivasi, identifikasi dan pengembangan potensi serta sumberdaya masyarakat. Jika memungkinkan dengan penerapan adopsi inovasi dan usaha perluasan akses jaringan (*networking*) pemasaran serta kemi-

traan. Hal tersebut untuk membantu percepatan pemulihan masyarakat pascaerupsi Gunung Merapi khususnya di bidang sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Penelitian ini juga sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab dan kewajiban pihak akademisi untuk membantu pihak pemerintah dalam melakukan penanggulangan serta pemulihan bencana alam.

Hal tersebut sebagaimana menurut Subiyantoro (2010: 13) bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya bukanlah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, namun menjadi tanggung jawab dan kewajiban masyarakat luas yang dilakukan melalui usaha mengantisipasi bencana melalui kekuatan yang berbasis masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kemampuan sumber daya setempat (*community disaster management*). Begitupun dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dalam Bab IV Alokasi dan Peran Pelaku Kegiatan Penanggulangan Bencana mengenai peran dan potensi masyarakat, salah satunya yaitu perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Kemudian penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. Maka diperlukan kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian adalah membuat model pemberdayaan masyarakat yang implementatif pascaerupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang secara harfiah artinya pengkajian (keadaan) desa (*secara*) partisipatif. Terdapat lima kunci utama desain penelitian untuk mengimplementasikan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) (Syahyuti 2006: 145) yaitu: (1) *Participation*. Masukan masyarakat lokal dalam aktivitas

PRA merupakan suatu yang esensial dan bernilai dalam penelitian sebagai perencanaan serta media untuk mendiskusikan pendekatan partisipatif dalam pembangunan; (2) *Teamwork*. Validitas data yang dihasilkan dari PRA tergantung dari interaksi informal dan *brainstroming* di antara pihak yang terlibat; (3) *Fleksibilitas*. PRA tidak menyediakan suatu *blueprints* untuk pelaksanaan (*practitioners*) tapi ditentukan oleh keterampilan tim, tersedianya waktu, sumberdaya, dan pilihan topik serta lokasi kerja; (4) *Optimal ignorance*. Agar efisien dalam konteks anggaran dan waktu, harus dikumpulkan informasi yang cukup untuk pembuatan rekomendasi dan keputusan; (5) *Triangulasi*. PRA bekerja dengan data kualitatif, dalam menjamin validitas setidaknya ada tiga sumber harus digunakan dalam mempelajari topik yang sama.

Lokasi penelitian ditentukan pada tempat yang mengalami dampak paling parah pascaerupsi Gunung Merapi, yaitu: Desa Tlogolele Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, Desa Jumuyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dan Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah serta Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta. Implementasi hasil penelitian, juga menjalin kemitraan dengan pemerintah desa di lokasi penelitian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah.

Penentuan informan penelitian dengan menggunakan *purposif* artinya pemilihan informan berdasarkan pertimbangan peneliti, bahwa informan tertentu dapat memenuhi kebutuhan penelitian. Maka untuk informan sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dipilih 15- 20 orang untuk setiap desa yaitu para pemangku kepentingan di tingkat lokal (*local stakeholders*) yaitu: ketua RT, RW, kepala dusun, perangkat desa dan atau kepala desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha (kelompok usaha), tokoh pemuda, dan aktifis.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan *focus group discussion* (FGD), kemudian untuk menganalisis data (Syahyuti, 2006: 150) yaitu dengan: (1)

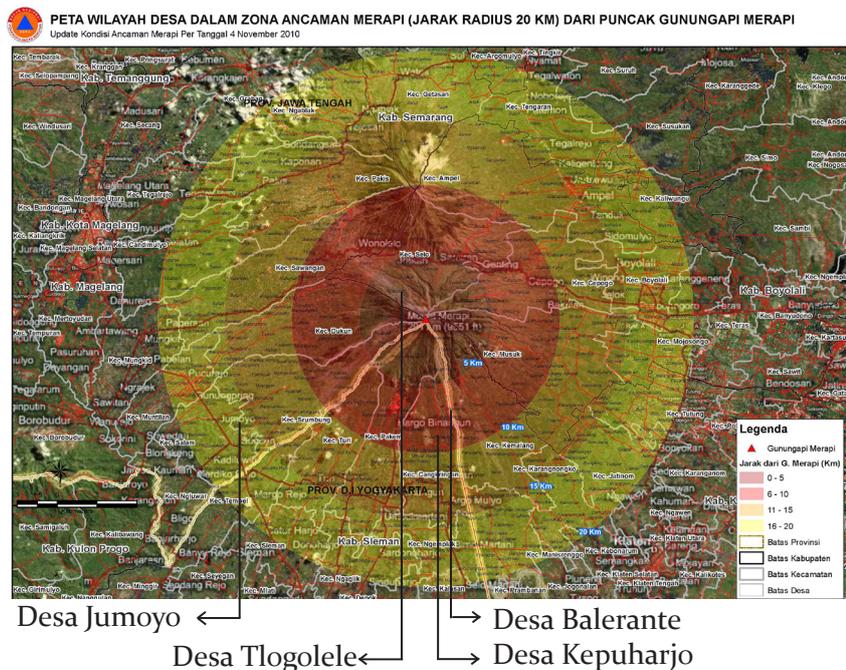
melakukan prinsip triangulasi; (2) Mencari keragaman dan sekaligus perbedaan; (3) Investigasi secara langsung dari dan dengan masyarakat lokal.

Analisis triangulasi adalah proses menyusun dan penafsiran data. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Analisis data telah di mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data juga merupakan proses penyusunan dan penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Miles dan Huberman (2007: 15-19) menjelaskan lebih lanjut dari ketiga komponen yaitu: (1) Reduksi data, yang merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan klasifikasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, yang berlangsung secara terus-menerus selama penelitian; (2) Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; (3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif mulai dari mencari,

mencatat keteraturan, membuat pola, menjelaskan konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian, sebagai tinjauan ulang pada catatan lapangan, dan tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan "kesepakatan intersubjektif".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi singkat empat desa lokasi penelitian adalah sebagai berikut Tlogolele adalah desa di Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini terletak dekat dari puncak Gunung Merapi dan berada pada zona berbahaya (berjarak 4 km dari puncak) dengan kondisi daerah berada di dataran tinggi berbatasan langsung dengan Gunung Merapi dan berjarak kurang lebih 4 km dari puncak Gunung Merapi. Desa Tlogolele mempunyai luas wilayah 463.1376 Ha dibagi menjadi 4 Dusun, 8 Dukuh, 5 RW dan 19 RT. Karena lokasi wilayah di lereng gunung maka banyak diantara waraga yang bekerja sebagai petani dan buruh tani di lading/tegalan (Sumber: Data Demografi Desa Tlogolele 2012). Jumoyo adalah desa yang ada di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Jawa Tengah, memiliki luas wila-



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 4 November 2010

yah 380,07 Ha dan jarak dari puncak gunung merapi kurang lebih 16 km. Desa Jumoyo memiliki penduduk kurang lebih 7376 jiwa yang tersebar di 10 dusun atau RW. Penduduk Desa Jumoyo umumnya berprofesi sebagai petani terutama petani salak, dan ada juga yang berprofesi sebagai pedagang (Sumber: Data Demografi Desa Jumoyo 2012). Balerante merupakan salah satu desa di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan luas desa 831.1230 Ha yang terbagi dalam 4 wilayah dusun, 8 RW dan 17 RT. Kemudian memiliki jarak dengan Gunung Merapi kurang lebih 7 km. Mata pencaharian penduduk terbanyak menjadi petani, peternak dan buruh tani (Sumber: RPJM Desa Balerante 2011-2015). Desa Kepuharjo berada di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta memiliki luas wilayah 875 Ha dengan jarak ke Gunung Merapi kurang lebih sekitar 8 km. Penduduknya sebagian besar menjadi petani dan buruh tani sektor pertanian, perkebunan serta peternakan, kemudian terdapat juga penduduk banyak bekerja di bidang jasa perdagangan dan pariwisata (Sumber: Data Demografi Desa Kepuharjo 2012). Adapun peta lokasi penelitiannya dapat dilihat pada Gambar 1.

Model Pemberdayaan

Hasil dari identifikasi dan analisis permasalahan serta potensi sumber daya di lokasi penelitian berdasarkan proses wawancara, FGD dan observasi terhadap masyarakat pascaerupsi Gunung Merapi, yaitu masyarakat lebih menekankan pada kebutuhan program pemberdayaan secara komprehensif, mulai dari kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan sebagai suatu kesatuan. Hal tersebut berguna untuk pemulihan (*recovery*) usaha-usaha ekonomi masyarakat yang dulu telah terbentuk dan menjadi mata pencaharian. Sebagaimana dalam hasil penelitian Andrayani (2011: 47) yang salah satunya membahas kebutuhan awal untuk pemenuhan ekonomi bagi masyarakat Merapi antara lain menghidupkan kembali usaha lama yang tidak memerlukan pembenahan fisik terlebih dahulu, aktifitas perdagangan di pasar tradisional,

pemberian benih, pemberian modal atau kredit lunak, alat produksi, pakan ternak, pendampingan UMKM sampai kepada pemasaran hasil produksi, menciptakan mata pencaharian baru dan atau memanfaatkan material yang ada. Revitalisasi kelompok tani maupun koperasi sebagai sentra pemulihan, pemberdayaan dan terwujudnya kemandirian desa di sekitar lereng Merapi perlu dilakukan.

Maka dalam penelitian ini terdapat tahapan hasil penelitian berupa, identifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tahapan berikutnya menganalisis dan mencari solusi kongkrit, kemudian tahapan pembuatan model pemberdayaan. Rangkaian tahapan hasil penelitian ini merupakan hasil dari, oleh dan untuk masyarakat pascaerupsi di lokasi penelitian Gunung Merapi. Menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai istilah dalam pendekatan penelitian yang menggunakan metode partisipatif dengan menekankan kepada pengetahuan lokal dan kemampuan masyarakat untuk membuat penilaian sendiri, menganalisis sendiri, dan merencanakan sendiri apa yang dibutuhkan. PRA memfasilitasi proses saling berbagi informasi (*information sharing*), analisis dan aktifitas antar *stakeholders*.

Menurut Syahyuti (2006: 143) PRA intinya adalah “...to enable development practitioners, government official, and local people to work together to plan context appropriate programs” (Syahyuti, 2006: 143).

Hal tersebut diperkuat oleh konsep dari Nair dan White (2004: 176) tentang model pembaharuan budaya dalam proses pembangunan yang memperhatikan sensitifitas, menghormati keberagaman dan bersifat toleran yang difahami melalui dialog untuk menilai kebutuhan serta merefleksikan proses aksi. Rangkaiannya adalah: (1) Tahapan mendiagnosa proses, dengan mengartikulasi kebutuhan, mengidentifikasi, menginventarisir, membuat peta alternatif menuju pada tahap selanjutnya; (2) Tahapan proses penelitian partisipatif, diawali dengan memilih beberapa alternatif, merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis data menuju tahapan

berikunya; (3) Tahapan proses aksi, yang di mulai dengan melanjutkan tindakan, memperhitungkan, merefleksikan dan memikirkan konsep.

Maka berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian di masyarakat pascaerupsi Gunung Merapi di keempat lokasi, adalah sebagai berikut:

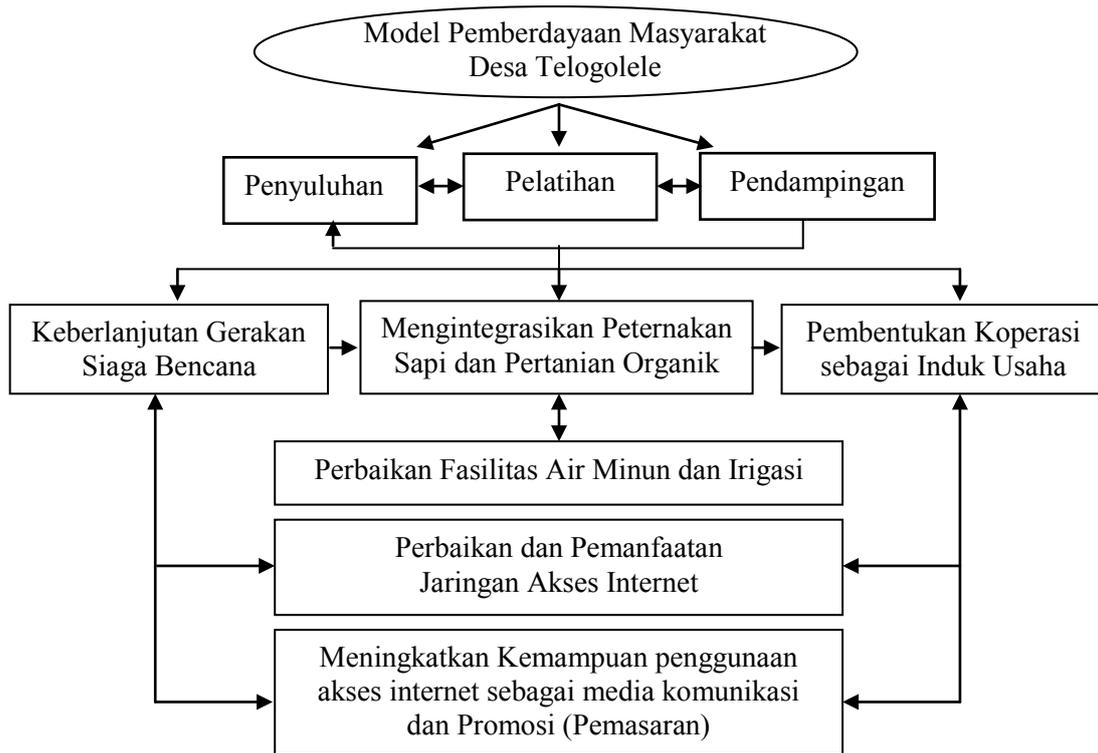
Model Pemberdayaan di Desa Tlogolele

Pertama, Identifikasi masalah, yaitu: (1) Masyarakat belum maksimal dalam memanfaatkan akses jaringan internet untuk pemasaran, promosi, menjalin akses kerjasama atau kemitraan. Padahal sudah terdapat fasilitas jaringan internet di kantor desa; (2) Kegiatan pendampingan hanya dilakukan pada proses produksi, tetapi belum sampai ke proses pemasaran pascaproduksi; (3) Kelompok siaga bencana masih kurang siap dan mampu untuk menangani bencana yang lebih besar seperti dalam menyediakan tempat penampungan evakuasi; (4) Peternakan sapi yang belum maksimal dalam proses penggemukan dan pembuatan pupuk organik; (5) Kurangnya kesadaran petani untuk melakukan budi daya pertanian organik, sehingga masih memiliki ketergantungan pada pupuk kimia (non organik); (6) Terdapat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bibit sayuran dan pupuk; (7) Peternak dan pasar belum terintegrasi, sehingga harga daging ditentukan oleh tengkulak; (8) Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Hal ini diindikasikan dengan masih besarnya jumlah lulusan sekolah dasar, dikarenakan masyarakat masih menganggap keberlanjutan pendidikan hanya menjadi beban ekonomi keluarga dan masih adanya budaya pernikahan pada usaha dini; (9) Masalah pada fasilitas umum pascabencana adalah air bersih, jalan umum, jalur evakuasi, jembatan dan jaringan irigasi yang masih dalam keadaan rusak; (10) Belum ada sertifikasi untuk tanaman organik, sehingga hasil tanaman organik ketika dipasarkan dihargai sama dengan yang hasil non organik; (11) Terdapat sebagian dari masyarakat yang masih belum sadar bahaya bencana merapi, sehingga kembali lagi ke zona (wilayah) tempat tinggalnya yang dikatago-

rikan bahaya. Karena merasa kesulitan beradaptasi dan kehilangan tempat pencaharian jika tinggal di tempat evakuasi (wilayah baru); (12) Masyarakat menilai bantuan dan pendampingan baik dari LSM dan pemerintahan masih belum selesai, karena kurangnya pada tahap pendampingan; (13) Belum bisa memanfaatkan hasil pertanian menjadi bahan olahan makanan, terbukti belum ada kelompok usaha olahan makanan; (14) Belum berkembang lembaga ekonomi bersama seperti koperasi untuk membantu hasil produksi dan pemasaran dari peternakan serta pertanian.

Kedua, Potensi yang teridentifikasi yaitu: (1) Adanya potensi dan minat dari masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas jaringan internet yang tersedia di desa; (2) Terdapat potensi yang cukup besar di bidang peternakan seperti sapi, kambing dan ikan lele; (3) Potensi besar dibidang pertanian seperti sayur mayur organik dan tembakau; (4) Sudah terbentuknya kelompok tani dan kelompok siaga bencana yang sudah diberikan pelatihan serta memiliki pengalaman menangani bencana baik skala kecil maupun besar. Kemudian memiliki semangat dan kepedulian yang tinggi dari masyarakat terhadap tanggap bencana; (5) Ada tempat relokasi untuk hunian tetap yang telah disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang daerahnya terkena bencana erupsi gunung merapi; (6) Masyarakat masih memiliki semangat untuk menerima dan bekerjasama dengan pihak luar seperti untuk kegiatan penyuluhan, pelatihan, bantuan dan pendampingan; (7) Sudah terdapat kelompok simpan pinjam yang diasumsikan oleh masyarakat sebagai lembaga koperasi yang belum diformalkan atau belum ada ijin pendirian secara resmi.

Ketiga, Analisis dan solusinya: (1) Perlu ada pelatihan internet bagi perangkat desa, kelompok usaha dan kelompok siaga bencana; (2) Perlu perbaikan fasilitas jaringan telekomunikasi serta internet; (3) Memerlukan pelatihan dan pendampingan peternakan sapi dan pertanian sayur mayur organik; (4) Mengintegrasikan hasil peternakan dan hasil pertanian mulai dari proses produksi sampai pemasaran; (5)



Gambar 2. Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Telogolele

Bagi kelompok siaga bencana memerlukan pelatihan lanjutan secara periodik untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang tidak terduga; (6) Memerlukan penyuluhan, pendekatan dan pendampingan yang lebih komprehensif, mulai dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya terhadap masyarakat yang masih menolak untuk direlokasi; (7) Mengusulkan perbaikan fasilitas umum seperti air bersih, jalan dan irigasi kepada pihak pemerintah; (8) Memerlukan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan untuk pembentukan koperasi yang berbadan hukum sebagai lembaga ekonomi bersama bagi kelompok usaha masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah dan potensi, serta analisis solusi, maka dapat di buat model pemberdayaan yang diimplementasikan dapat dilihat pada Gambar 2.

Model Pemberdayaan di Desa Jumoyo

Pertama, Identifikasi masalah: (1) Bantuan bibit salak pondoh dari pemerintah dan LSM tidak cocok dengan lahan yang dimiliki; (2) Irigasi dalam keadaan rusak, sehingga mengganggu usaha perikanan dan

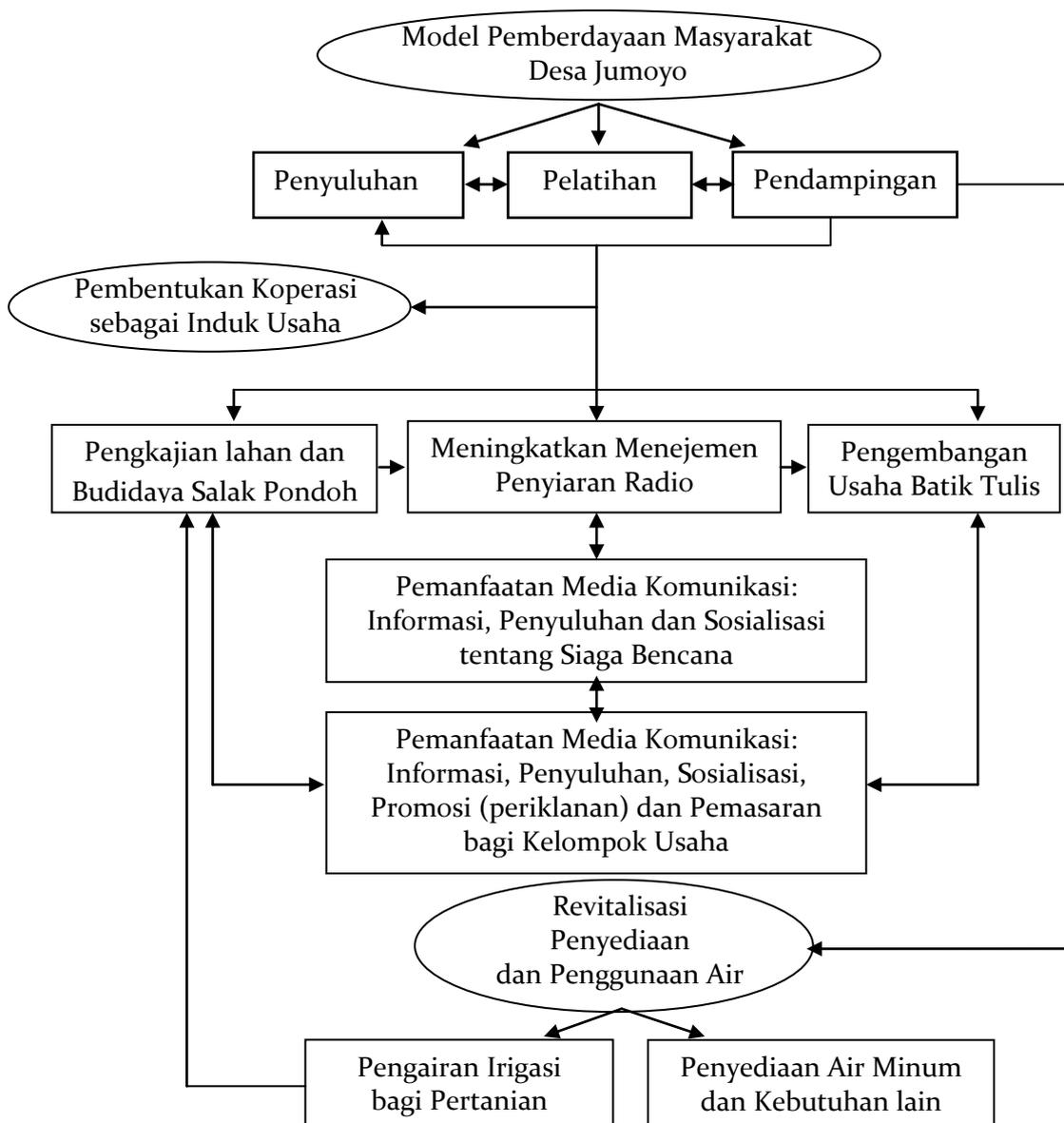
pertanian; (3) Kesulitan sumber air bersih, karena mata air yang hilang; (4) Kelompok usaha batik masih memiliki masalah peralatan produksi, pemasaran dan pengembangan spesifikasi jenis produksi; (5) Belum terbentuknya koperasi induk yang resmi dan dapat menghimpun kelompok usaha; (6) Masyarakat menjadi kurang berminat menanam Salak, karena jangka produksinya lama dan banyak lahan masyarakat yang sudah tertutup oleh timbunan pasir, sehingga masyarakat beralih profesi menjadi kuli pasir sekaligus menyewakan lahan pasirnya; (7) Bantuan dari LSM dan pemerintah sangat banyak, tetapi masih berbasis proyek dan tidak ada keberlanjutan dan pendampingan; (8) Penyuluhan dan pelatihan yang diikuti warga juga sudah sangat banyak, tetapi pihak desa tidak menginventarisir kegiatan tersebut, sehingga kurang adanya pemerataan kegiatan; (9) Belum ada upaya masyarakat untuk mengolah sumber pasir yang tersedia, hanya dimanfaatkan untuk penambangan pasir.

Kedua, Potensi yang teridentifikasi adalah: (1) Masyarakat sudah berpengalaman

man secara turun temurun untuk budi daya salak pondoh dan produksi gula merah; (2) Memiliki kemampuan dan semangat untuk memproduksi batik; (3) Melimpahnya sumber penambangan pasir yang bisa lebih dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi hasil produksi seperti batako dan *paving-block*; (4) Perkoperasian kelompok usaha sudah terbentuk mulai dari pengurus dan anggota serta sudah berjalannya usaha simpan pinjam, namun belum memiliki koperasi induk yang badan hukum; (5) Terdapat potensi bahan baku seperti ketela dan pepaya untuk usaha pengolahan makanan; (6) Terdapat radio komunitas yang memiliki

frekuensi yang sudah terdaftar.

Ketiga, Analisis dan solusi: (1) Perlu dilaksanakan kajian tentang lahan warga yang dulunya sangat potensial ditanami salak pondoh; (2) Perlu dicarikan alternatif sumber air atau revitalisasi sumber air; (3) Pengadaan alat produksi batik dan pelatihan peningkatan diversifikasi produk batik; (4) Perlu dilakukan pelatihan koperasi untuk mengintegrasikan kelompok usaha dalam satu lembaga koperasi yang berbadan hukum; (5) Menginventarisasi jenis penyuluhan dan pelatihan yang telah diikuti oleh warga, sehingga bisa memenuhi unsur pemerataan; (6) Membutuhkan pelatihan



Gambar 3. Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumoyo

keterampilan pengolahan produksi makanan dari ketela dan pepaya. (7) Perlu adanya perbaikan fasilitas radio komunitas dan pelatihan produksi siaran radio khususnya segmentasi tanggap bencana.

Adapun model pemberdayaan yang dirancang untuk dapat diimplementasikan dapat dilihat pada Gambar 3.

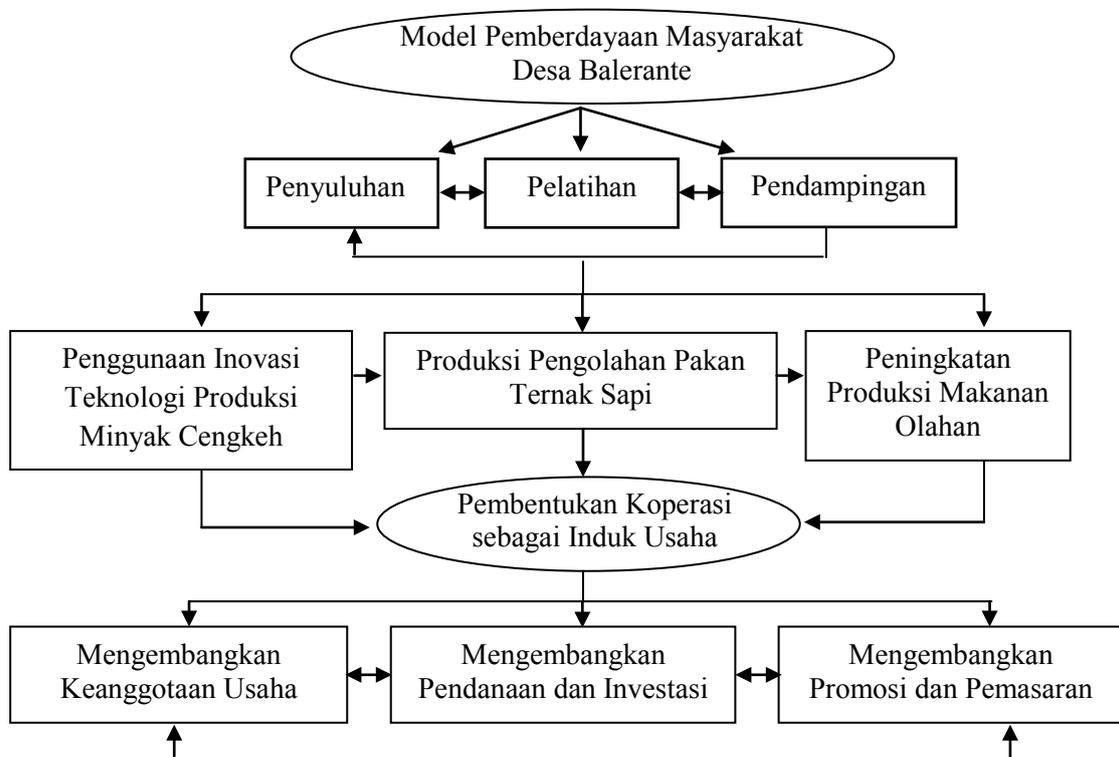
Model Pemberdayaan di Desa Balerante

Pertama, Identifikasi masalahnya:

(1) Kelompok usaha makanan kering masih terbatas alat pengering untuk membuat makanan kering yaitu keripik pisang, ceriping ketela, keripik nangka dan kripik bayam. Kemudian masih kesulitan mengembangkan pemasaran dan penyediaan kebutuhan bahan bakunya yang bersifat musiman; (2) Kelompok usaha batik masih belum memiliki keterampilan (*skill*) lanjutan dalam memproduksi batik Merapi, dikarenakan anggota kelompok yang pernah dilatih masih sedikit dan waktunya sebentar. Kemudian penghasilan dari batik masih minim dan kendala kesulitan pemasarannya serta harga jual yang masih belum bisa bersaing (ma-

sih mahal); (3) Masih kesulitan mengolah cacing untuk pakan ikan (pelet ikan); (4) Masyarakat pemilik sapi tidak melanjutkan sistem gaduh. Sehingga terjadi persoalan ketika ada ganti rugi terhadap sapi yang mati akibat bencana; (5) Adanya permasalahan dalam proses produksi seperti pada teknologi pengolahan produksi minyak cengkeh, akibatnya hasil produksi masih sedikit, belum mendapat sertifikat uji laboratorium dan pengemasan produk masih dijual secara eceran biasa, dengan tidak dalam bentuk kemasan botol kecil yang lebih menarik; (6) Permasalahan koperasi belum memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi lembaga koperasi simpan pinjam dan memiliki badan hukum; (7) Kesulitan kebutuhan sumber air bersih dan untuk irigasi.

Kedua, Identifikasi potensi, yaitu: (1) Kelompok usaha keripik pisang, keripik ketela, keripik bayam, selai pisang dan selai nangka sudah memiliki keterampilan, karena telah mendapat pelatihan olahan makanan; (2) Terdapat kelompok pengrajin kain batik Merapi, karena sudah pernah dilatih untuk membuat batik di Universitas Mu-



Gambar 4. Model Pemberdayaan Masyarakat Desa

hammadiyah Surakarta (UMS); (3) Pemasaran batik merapi memiliki khasan dan daya tarik tersendiri seperti motif flora dan fauna Merapi; (4) Budidaya pupuk kompos cacing sangat mudah dan tingkat permintaan pasar tinggi, khususnya untuk tanaman hias. (5) Kelompok usaha makanan olahan telah memiliki jaringan (akses) pemasaran ke Supermarket Mirota Yogyakarta; (6) Bahan baku daun cengkeh tersedia banyak dan hasil minyak cengkeh memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi serta tidak memiliki kesulitan dalam pemasaran; (7) Kemudian sudah terbentuk kelompok penyuling cengkeh yang bernama Al Barokah; (8) Terdapat personil untuk tim siaga bencana yang sudah dilatih.

Ketiga, Analisis dan Solusi: (1) Melakukan kegiatan penyuluhan pelatihan dan pendampingan produksi dan desain batik; (2) Pelatihan dan pendampingan teknik penyulingan minyak cengkeh dengan pendekatan inovasi teknologi dan pengemasan produk dengan label yang lebih menarik. Kemudian melakukan studi banding ke perusahaan penyulingan minyak cengkeh; (3) Pengadaan alat pembuatan konsentrat pakan sapi; (4) Penyediaan dan penambahan bahan baku, melakukan pendampingan, pemasaran dan memfasilitasi permodalan bagi kelompok olahan makanan; (5) Memfasilitasi dan melakukan pendampingan untuk mendapatkan sertifikat standar laboratorium bagi produksi minyak cengkeh serta standar pengemasan yang lebih bersaing.

Model pemberdayaan yang dirancang untuk dapat diimplementasikan dapat dilihat pada Gambar 4.

Desa Kepuharjo Sleman

Pertama, Identifikasi masalah: (1) Kelompok usaha pembuatan kripik aneka rasa memiliki kesulitan permodalan dan pemasaran; (2) Masih kurang memadai tempat untuk kegiatan promosi dan pemasaran; (3) Terdapat kesulitan dalam manajemen komunal untuk pengelolaan kandang ternak sapi secara bersama di hunian tetap (Huntap), karena belum ada pengurus yang terorganisir untuk pengelolaan kandang sapi bersama dan modal usaha bersama;

(4) Kesulitan dalam mencari rumput untuk pakan sapi, sehingga sebagian peternak mengembala sapi di tempat hunian lama yang berstatus bahaya; (5) Permasalahan mengembangkan pemasaran produk *wedang uwuh* instan sebagai minuman khas; (6) Kelompok usaha yang dahulunya sudah dilatih dan terbentuk di hunian sementara, tidak melanjutkan usahanya karena setiap anggota berpindah ke lokasi tempat tinggal di hunian tetap yang berbeda. Akibatnya para anggota kelompok usaha sulit berkoordinasi dan berkerja sama lagi serta terhenti proses produksi; (7) Masih kesulitan dalam proses pengeringan kandungan minyak pada produk olahan makanan. Kemudian belum mendapat sertifikat ijin usaha industri rumah tangga dari departemen kesehatan.

Kedua, Identifikasi potensi: (1) Tersedia bahan baku untuk produksi kripik, sebagian masyarakat sudah mendapat pelatihan pembuatan kripik; (2) Sudah terbentuknya tim promosi desa untuk memasarkan produk dan sudah memiliki tempat pemasaran atau promosi serta sudah ada akses pemasaran ke swalayan di Kota Yogyakarta; (3) Terdapat kandang sapi komunal yang telah dibangun secara permanen di hunian tetap; (4) Terdapat bahan baku untuk membuat *wedang uwuh* sebagai minuman tradisional khas Yogyakarta; (5) Terdapat kelompok tani Pepaya Thailan dan lahan tersedia seluas 10 hektar milik kelompok tani dengan sumber pembibitan bantuan dari LSM; (6) Ada kelompok kerajinan tas rajut sebagai bentuk usaha pribadi dan terdapat potensi kerajinan sangkar burung dari bambu serta usaha batako dari pasir Merapi.

Ketiga, Analisis dan solusi: (1) Melakukan pendampingan untuk mendapat akses permodalan dan perluasan pemasaran bagi kelompok usaha; (2) Mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi pembentukan lembaga usaha bersama dalam bentuk koperasi yang berbadan hukum; (3) Pembentukan pengurus kelompok pengelola kandang sapi komunal di hunian tetap; (4) Perbaikan sarana dan prasarana tempat untuk promosi dan pemasaran; (5) Pelatihan dan pembuatan *website* bagi tim promosi desa untuk membantu pemasaran produk;

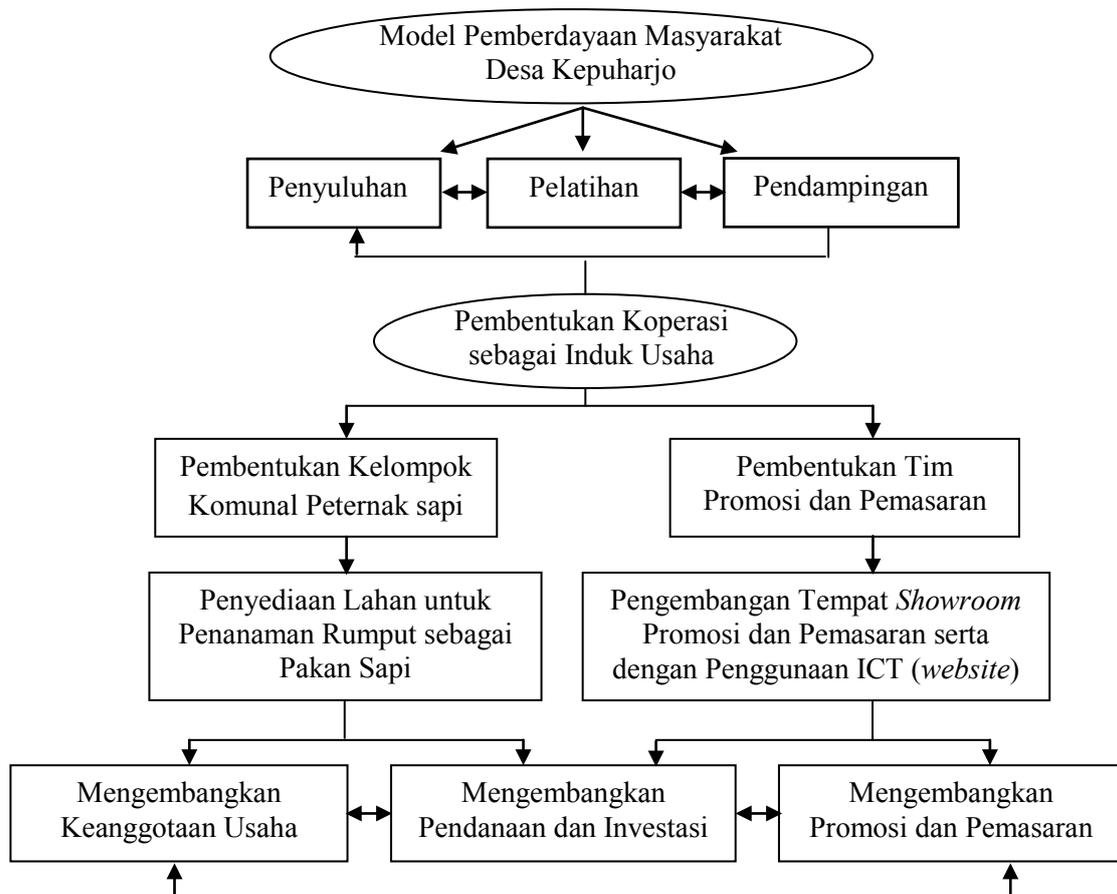
(6) Memfasilitasi industri rumah tangga untuk mendapatkan ijin usaha dari departemen kesehatan; (7) Menyediakan lahan bagi penanaman rumput yang dapat dijadikan sumber pakan sapi di zona larangan hunian yang terkena bencana.

Model pemberdayaan yang dirancang untuk dapat diimplementasikan dapat dilihat pada Gambar 5.

Berdasarkan hasil penelitian di empat lokasi tersebut, terdapat persamaan yaitu kebutuhan model pemberdayaan masyarakat yang komprehensif sebagai bentuk peningkatan kemampuan dan keberdayaan mulai dari individu, kelompok, hingga ke suatu komunitas untuk dapat meraih kemandirian dan kesejahteraan. Sebagaimana dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra (Suharto, 2005: 66-67) yaitu: (1) Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individual melalui bimbingan, konseling, stress manajemen, *crisis inter-*

vention. Tujuan utamanya membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya; (2) Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan dan dinamika kelompok digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya; (3) Aras Makro, pemberdayaan yang diarahkan kepada lingkungan yang lebih besar (*large-system strategy*), seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, dan manajemen konflik. Klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasinya dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Kemudian menurut Persons *et al*; (1994: 106) ada tiga dimensi pemberdayaan yaitu: (1) Proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang



Gambar 5. Model Pemberdayaan Masyarakat Desa

selanjutnya berkembang menjadi sebuah perubahan yang lebih luas; (2) Keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain; (3) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan memperkuat posisi tawar orang-orang yang tidak berdaya, untuk selanjutnya melibatkan upaya kolektif dari orang-orang yang tidak berdaya tersebut memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menguasai. Sebagaimana menurut Ife (2002: 53) pemberdayaan berfungsi untuk meningkatkan keberdayaan dari pihak yang dirugikan (*the disadvantaged*).

Maka dengan hasil penelitian berupa model pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang diharapkan. Sebagaimana menurut Mardikanto (2010: 127-128) pemberdayaan memiliki tujuan: (1) Perbaikan pendidikan (*better education*); (2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*); (3) Perbaikan tindakan (*better action*); (4) Perbaikan kelembagaan (*better instution*); (5) Perbaikan usaha (*better bussines*); (6) Perbaikan pendapatan (*better income*); (6) Perbaikan lingkungan (*better environment*); (7) Perbaikan kehidupan (*better living*); (8) Perbaikan masyarakat (*better community*).

SIMPULAN

Ketangguhan sosial, ekonomi dan budaya di daerah rawan bencana seperti di masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta masih harus mendapat perhatian serius, salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan penguatan kapasitas kelembagaan. Maka sangat penting dan strategis adanya penelitian yang menghasilkan model pemberdayaan masyarakat yang implementatif dalam perspektif yang lebih partisipatif dengan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

Hasil penelitian berupa identifikasi masalah dan potensi serta analisis solusi berdasarkan teknik wawancara, observasi dan *Focus group discussion* (FDG) dari keempat lokasi, memiliki kesamaan dalam

model pemberdayaan yaitu membutuhkan serangkaian kegiatan yang komprehensif mulai dari penyuluhan, pelatihan dan pendampingan harus satu sinergi yang tidak boleh dipisahkan. Selama pascaerupsi, banyaknya penyuluhan, pelatihan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat, namun menjadi kurang mendukung pada aspek keberlanjutan, karena tidak disertai dengan kegiatan pendampingan. Kemudian kebutuhan lembaga koperasi induk yang memiliki badan hukum sebagai pusat usaha perekonomian untuk memenuhi kebutuhan permodalan, penyediaan bahan baku, dan akses jaringan pemasaran bagi kelompok usaha. Kemudian masyarakat membutuhkan pelatihan secara periodik dan penguatan kembali kelompok siaga bencana di tingkat desa.

Adapun perbedaan di empat lokasi penelitian sebagai kekhasan yang harus menjadi perhatian bagi implementasi model pemberdayaan yaitu: Desa Tlogolele Kecamatan Selo.

Kabupaten Boyolali yaitu pemberdayaan yang mengintegrasikan bidang usaha peternakan dan pertanian organik mulai dari proses produksi sampai pemasaran. Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, membutuhkan adanya riset lanjutan pengkajian dan optimalisasi lahan untuk budidaya salak pondoh, serta pemberdayaan tentang budi daya salak pondoh. Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Kelaten, yaitu penerapan inovasi teknologi produksi dan pengemasan minyak cengkeh serta uji laboratorium untuk mendapatkan sertifikasi. Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, yaitu pembentukan kelompok komunal peternak sapi, penyediaan pakan sapi dan peningkatan fasilitas tempat promosi serta pemasaran untuk produksi usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menghaturkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan kebijakannya sehingga proses penelitian kami dapat diselenggarakan dengan baik, yaitu kepada yang kami hormati: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor Unsoed dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman, Seluruh Pemerintahan Desa dan Masyarakat yang menjadi informan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrayani, T.T. 2011. Dana Sumbangan Masyarakat Untuk Pembangunan Ekonomi Pascabencana Merapi. *Jurnal Penanggulangan Bencana*. 2(1): 41-49
- Ife, J. 2002. *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education Australia (AU): Frenchs Forest
- Maarif, S. 2010. Bencana dan Penanggulangannya Tinjauan dari Aspek Sosiologis. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*. 1(1): 1-7
- Mardikanto, T. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat: Acuan Bagi Aparat Birokrasi, Akademisi, Praktisi dan Minat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press
- Milles, M.B., Huberman AM. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Rohidi TR. Jakarta: UI Press
- Nair, K.S., White S.A. 2004. Participatory Development Communication as Cultural Renewal. White SA, Nair KS, Ascroft J, editors. *Participatory Communication: Work for Change and Development*. New Delhi, Thousand Oaks. London: Sage Publications
- Payne, M. 1997. *Modern Social Work Theory. Second Edition*, London: McMillan Press Ltd
- Parsons, R.J, James D.J, Santos H.H. 1994. *The Integration of Social Work Practice*, California: Brooks/Cole. Payne
- Subiyantoro, I. 2010. Upaya Mengantisipasi Bencana Melalui Kekuatan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*. 1(2): 9-16
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Syahyuti. 2006. *Tiga Puluh Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang Konsep, Istilah, Teori, Indikator serta Variabel*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata

Sumber lain

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
<http://bpbdd.jatengprov.go.id>, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, diunduh 4 Mei 2012
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/02/26/058386435/Hujan-7-Sungai-di-Merapi-Banjir-Lahar-Dingin>, diunduh 4 Mei 2012
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/banjir-lahar-dingin-merapi-magelang-yogya-sempat-ditutup.html>, diunduh 4 Mei 2012